

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Panitia Ujian Akhir Mula Hina Program Studi Ekonomi Pembangunan, jenjang Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No. 11920/SK/BAN-PT/AK-PP2/S/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, dengan ini menyatakan bahwa;

NAMA : MARGARETHA PAGIT
REHULINA BR. TARIGAN
NPM : 20530015
PROG. STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan Lisensi Kompetensi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) pada Hari Selasa, 27 Agustus 2024 dinyatakan LULUS

Panitia Ujian,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Nancy Nopeline, S.E., M.Si	1. 
2. Sekretaris	: Martin Luter Purba, S.E., M.Si	2. 
3. Penguji Utama	: Elvis F. Purba, S.E., M.Si	3. 
4. Anggota Penguji	: Dr. Nancy Nopeline, S.E., M.Si	4. 
5. Pembela	: Martin Luter Purba, S.E., M.Si	5. 

Dekan

(Dr. Nancy Nopeline, S.E., M.Si)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah prinsip utama untuk mencapai tujuan suatu negara, yaitu pertumbuhan atau pembangunan. Dengan definisi sebagai proses dalam meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat, mulai dari gaya hidup yang sehat, aman hingga pendidikan yang baik dan kehidupan dasar yang kuat. Dalam pembangunan suatu negara, pembangunan manusia adalah subjek sekaligus objek; dengan kata lain, manusia adalah pelaku dan sasaran pembangunan. Akibatnya, membangun sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan bagian penting dari pembangunan (Muliza dkk., 2017).

Pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu negara. Salah satu indikator penting untuk mencapai perkembangan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang terkait dengan kualitas produk atau barang yang diproduksi. Perbaikan terus menerus yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, berdaya saing, maju, dan sejahtera dikenal sebagai pembangunan. Menurut Simatupang Pantjar dan Saktyanu K. (2022), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pembangunan jangka panjang dan jangka pendek harus digunakan untuk menetapkan tujuan pembangunan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan pembangunan manusia sebagai proses meningkatkan kualitas hidup manusia.

Berikut ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data Empat Dimensi Dasar Pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo Tahun 2011-2022:

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Tahun) dan Empat Dimensi Dasar Pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo Tahun 2011-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Dimensi Harapan Lama Sekolah HLS (Tahun)	Dimensi Rata-rata Lama Sekolah RLS (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) (Ribu Rupiah/Tahun)
2011	71,12	70.32	11.84	9.03	11265
2012	71,4	70.34	11.86	9.17	11359
2013	71,62	70.38	11.87	9.25	11453
2014	71,84	70.42	11.89	9.33	11548
2015	72,69	70.62	12.22	9.50	11800
2016	73,29	70.69	12.65	9.51	11925
2017	73,53	70.77	12.71	9.54	12059
2018	73,91	70.97	12.73	9.55	12367
2019	74,25	71.27	12.75	9.62	12474
2020	74,43	73.44	12.76	9.79	12349
2021	74,83	73.64	12.77	10.00	12412
2022	75,36	74.14	12.95	10.02	12554

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo Tahun 2003-2022 dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2011-2022*

Tabel 1.1, IPM, UHH, HLS, RLS, Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (PPP) Kabupaten Karo tahun 2011 - 2022 mengalami kenaikan. Dimana IPM Kabupaten Karo tahun 2011-2013 berdasarkan levelnya menduduki level tinggi diangka 75,79. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Karo relatif tinggi, dan untuk mencapai tingkat tersebut, masih ada kesenjangan yang perlu diperbaiki. Seperti dari pembangunan infrastruktur dimana pemerintah harus meningkatkan

akses fasilitas umum dan jaringan transportasi untuk mendukung pembangunan manusia lebih baik.

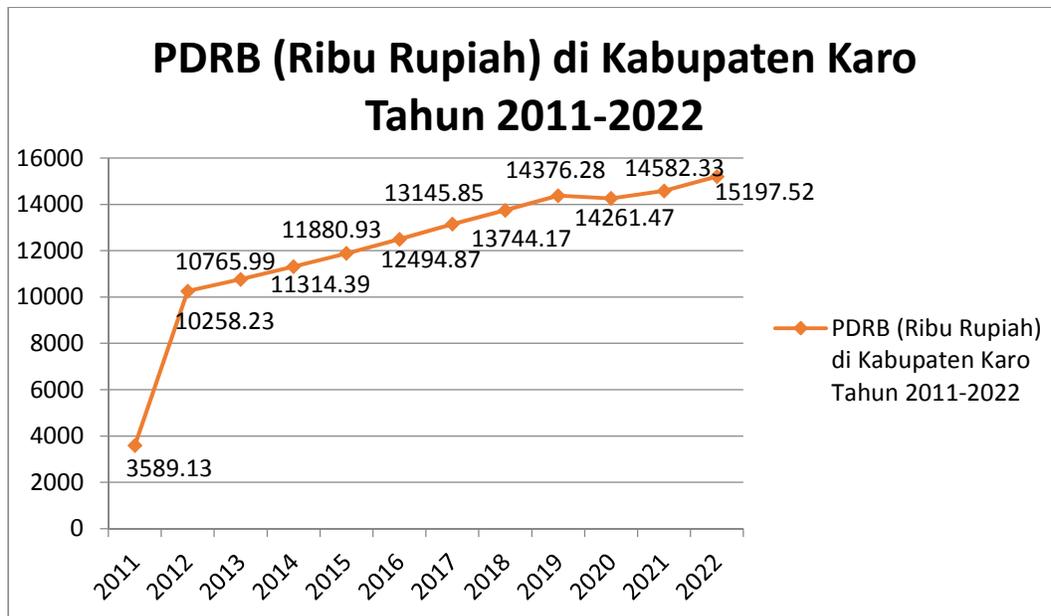
HLS tahun 2011 mencapai 11,84 tahun terjadi karena pentingnya kualitas pendidikan dimasyarakat Kabupaten Karo dimulai usia 7-18 Tahun dengan wajib belajar 12 tahun. Kenaikan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Karo. HLS dapat menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki peluang untuk menempuh pendidikan formal di Kabupaten Karo mulai dari usia 7 tahun. Angka RLS Kabupaten Karo tahun 2011 mencapai 9,03 tahun karena masyarakat Kabupaten Karo berusia 25 tahun sedang menempuh pendidikan formal.

Namun, IPM tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 71.84 berdasarkan levelnya menduduki level tinggi yaitu 75.36 diakibatkan Letusan Gunung Sinabung yang mengakibatkan pemindahan sekitar 20.000 penduduk dari daerah sekitarnya kejadian dipindahkan ke Relokasi Siosar. Pada Tahun 2015-2021 IPM mengalami kenaikan dan berdasarkan levelnya menduduki level tinggi kenaikan dan menduduki level 73.27. Data ini menunjukkan bahwa ditahun 2015-2021 Indeks Pembangunan Manusia meningkat secara bertahap selama periode itu. Memasuki tahun 2022 IPM mengalami penurunan 72,90 dan menduduki level 75,36 dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 terdapat 216 jiwa jumlah penduduk yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan sembuh 1955 jiwa. Pada tahun 2022 UHH mencapai 74 tahun terjadi karena masyarakat Kabupaten Karo tersebut sehat, makanannya sehat, olahraga teratur, dan sirkulasi udara Kabupaten Karo sehat bagi tubuh. Pada tahun 2022, angka HLS mencapai 12,95 dikarenakan kenaikan yang baik menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Karo semakin menyadari pentingnya suatu pendidikan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pada tahun 2022,

angka tersebut mencapai 10,22 Tahun. RLS Kabupaten Karo naik menjadi 10,02 tahun saat memasuki masa New Normal tahun 2022. Setelah mengalami masa sulit karena pandemi COVID-19 IPM pada tahun 2020, Kabupaten Karo tahun 2021 dan 2022 mulai mengalami perbaikan selama masa New Normal. Pada tahun 2020 Pengeluaran PerKapita mengalami penurunan sebesar Rp. 12.349.000/tahun hal ini disebabkan terjadinya Covid-19 yang memasuki Kabupaten Karo. Sehingga masyarakat diliburkan, banyak toko tutup, dan kegiatan belajar mengajar juga dirumahkan. Namun, seiringnya Tahun Pengeluaran Per Kapita mengalami kenaikan di era New Normal akibat masyarakat kembali beraktivitas diluar rumah dan bangkit dari keterpurukan dimasa Covid-19.

Selain pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan Kabupaten Karo karena upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi (Khairul dalam Dondo, Benu, dan Manginsela, 2019). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

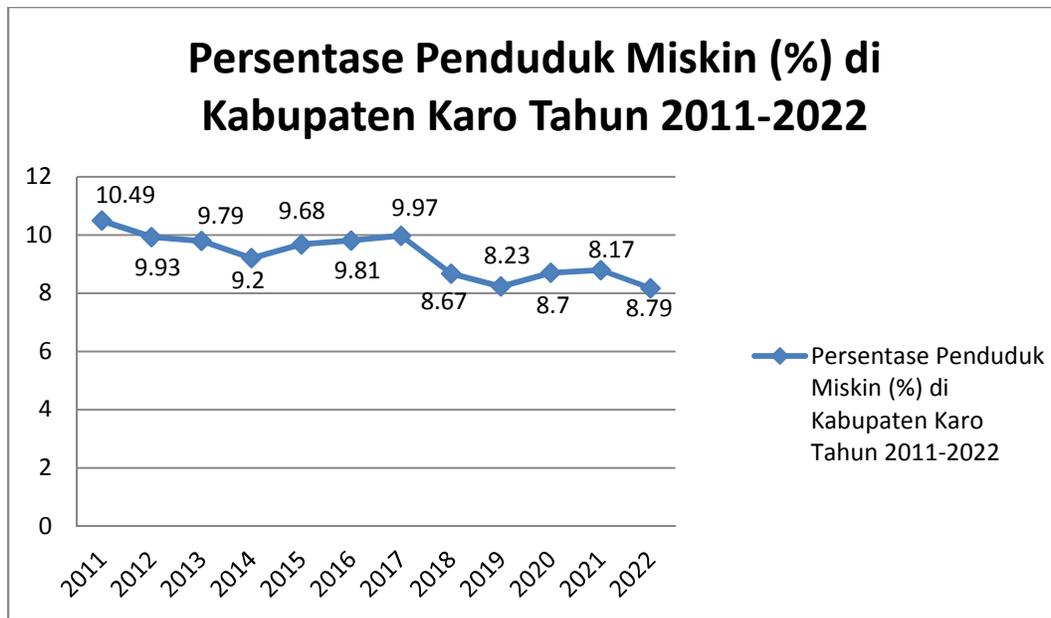
Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengakhiri kemiskinan. Menurut teori efek trickle down, pertumbuhan ekonomi akan turun dari atas ke bawah, atau tingkat kenaikan pendapatan riil akan berpindah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Jika pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, akan lebih menguntungkan (Ardianto, T. 2016).



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo Tahun 2003-2022 dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2011-2022*

Gambar 1. 1 PDRB (Ribuan Rupiah) di Kabupaten Karo Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2011-2022

PDRB Kabupaten Karo terus meningkat dari tahun 2011–2022, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Pada tahun 2019, PDRB mencapai 14376,3 Ribuan Rupiah, menunjukkan awal periode pertumbuhan yang relatif tinggi. Namun, di tahun 2020, terjadi penurunan karena COVID-19 menjadi 14261,47 Ribuan Rupiah. Pada tahun 2021, bagaimanapun, terjadi peningkatan sebesar 14582,33 Ribuan Rupiah, dan pada tahun 2022, juga terjadi kenaikan sebesar 15197,52 Ribuan Rupiah sesuai dengan New Normal. Kabupaten Karo berada pada peringkat ke-13 dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam hal tingkat kemiskinan. Kabupaten Nias Barat memiliki persentase kemiskinan tertinggi (25,69%), sedangkan Kabupaten Deli Serdang memiliki persentase terendah (3,88%).



Sumber: Badan

Pusat Statistik Kabupaten Karo Tahun 2003-2022 dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2011-2022

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karo Tahun 2011- 2022

Penurunan jumlah orang miskin di Kabupaten Karo dari tahun 2011-2012 ditunjukkan pada Gambar 1.2 di atas. Namun, di tahun 2013, 2015 hingga tahun 2017 persentase penduduk miskin kembali naik diakibatkan dampak meletusnya Gunung Sinabung. Dimana delapan desa diungsikan, menyebabkan masyarakat Kabupaten Karo kehilangan pekerjaan. Kemiskinan di Kabupaten Karo meningkat karena orang-orang yang mengungsi tidak dapat bekerja di tenda pengungsian seperti biasa. Penduduk Kabupaten Karo yang di relokasikan ke tempat tinggal baru juga tidak dapat melakukan pekerjaan dikarenakan masyarakat sudah terbiasa berladang. Banyak hasil pertanian rusak dan mati akibat Letusan Gunung Sinabung sehingga masyarakat Kabupaten Karo tidak mendapatkan pendapatan. Pada tahun 2018-2019 persentase penduduk miskin kembali turun di karenakan berkurangnya dampak Erupsi Gunung Sinabung. Dimana masyarakat di tenda pengungsian sebagian besar kembali ke desanya dan bekerja seperti biasa sehingga

perputaran uang terjadi dan mengakibatkan turunnya kemiskinan. Namun, karena pandemi COVID-19 di Kabupaten Karo di tahun 2020-2021, ada peningkatan. Banyak aktivitas diluar rumah dilakukan dirumah, pegawai-pegawai bekerja dari rumah, masyarakat di Kabupaten Karo dengan mata pencaharian bertani juga dirumahkan sehingga terjadinya kenaikan Kemiskinan di Kabupaten Karo. Kemudian memasuki tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo menurun sebesar 35.93% karena telah diberlakukannya masa New Normal, sehingga kegiatan bekerja diluar rumah sudah berjalan dan terjadinya peputaran uang pendapatan di Kabupaten Karo.

Kemudian instrumen selanjutnya yang mempengaruhi IPM adalah jumlah penduduk. Menurut Zakaria., (2018): "Peran penduduk sebagai penggerak pembangunan muncul dari jumlah penduduk yang besar, potensi pasar, kebutuhan akan keberagaman penduduk dan ketersediaan pelayanan. Dampaknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan".



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo Tahun 2003-2022 dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2011-2022*

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk (Jiwa) di Kabupaten Karo Tahun 2011-2022

Jumlah penduduk Kabupaten Karo menurun setiap tahun, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3. Pada tahun 2013, jumlah korban meninggal dunia turun menjadi 326.307 karena empat letusan Gunung Sinabung yang terjadi antara tanggal 15 dan 18 September 2013. Sehingga mengakibatkan sebanyak 5.535 jiwa penduduk dari 8 Desa diungsikan. Memasuki tahun 2021 jumlah Penduduk di Kabupaten Karo mengalami penurunan menjadi 409,077 jiwa. Dikarenakan tahun 2021 terdapat 137 jiwa meninggal dunia diakibatkan COVID-19 yang melanda Kabupaten Karo itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh aktivitas di luar rumah, seperti pernikahan dan upacara kematian yang diadakan di Jambur, pendidikan di sekolah, dan sebagainya. Setelah mengalami masa sulit pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19, jumlah penduduk Kabupaten Karo mulai meningkat pada tahun 2022 sebagai bagian dari Era New Normal, yang dimulai setelah penurunan COVID-19 yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Karena populasi yang terus meningkat setiap tahun, tingkat kemiskinan akan terus meningkat. Selain itu, teori Malthus (1798), yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan kemiskinan kronis karena penurunan pendapatan per kapita dan ketidakmampuan pasokan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baru. Hal ini terjadi karena orang miskin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh PDRB, Persentase Penduduk Miskin, dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Karo Tahun 2011–2022" menarik perhatian penulis karena latar belakang masalah di atas.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis dapat membangun dan membahas masalah berikut dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo?
2. Bagaimanakah pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo?
3. Bagaimanakah pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo
2. Untuk mengetahui pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo
3. Untuk mengetahui Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke beberapa pihak terkait, seperti:

1. Bagi Pemerintah sebagai referensi atau sumbangan ide yang dapat dipertimbangan pemerintah dan instansi terkait.

2. Bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau bidang lain yang berhubungan.
3. Bagi penulis sebagai implementasi dari pengetahuan yang mereka peroleh dari program studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik Karo, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dengan tujuan untuk mengukur kualitas hidup manusia. Untuk menghitung nilai IPM, empat dimensi digunakan, yaitu; 1). Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir - *Life Expectancy* (LE); 2). Harapan Lama Sekolah (HLS) *Mean Years of Schooling* (MYS); 3). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) - *Expected Years of Schooling* (EYS); 4). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - *Purchasing power parity* (PPP).

Negara dapat dikategorikan sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Karena pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, suatu negara berkembang berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat melakukan pembangunan. Oleh karena itu, semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat semakin besar daya beli

masyarakat, yang pada gilirannya menghasilkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik di suatu negara.

Program Pembangunan Dunia (UNDP) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan dalam pendidikan. Faktor-faktor ini termasuk rata-rata waktu sekolah, partisipasi sekolah, melek huruf, dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Untuk melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga dikenal sebagai HDI, UNDP menerbitkan publikasi tahunan yang disebut Laporan Pembangunan Manusia pada tahun 1990. Tujuan publikasi ini adalah untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Meskipun tidak dapat mengukur setiap elemen penting dari penilaian pembangunan manusia, ia dapat menunjukkan tingkat kemampuan fundamental penduduk.

2.1.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Teori ekonomi sumber daya manusia adalah bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia—juga dikenal sebagai sumber daya manusia—adalah komponen yang paling menentukan sifat dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa, menurut Todaro M. P. (2006). Sumber daya manusia tidak sama dengan modal fisik atau sumber daya material. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan patron pembangunan percaya bahwa manusia mampu berkembang meskipun mereka tidak memiliki kekayaan alam. Investasi manusia dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total dan menyeluruh. Karena modal fisik, tenaga kerja, dan tanah akan menghasilkan peningkatan pendapatan, tetapi ini tidak berlaku untuk bidang ilmu pengetahuan (Kuncoro, 1997).

Berikut teori-teori ekonomi sumber daya manusia yang muncul sejak zaman aliran klasik modern, yaitu:

1. Teori Adam Smith Klasik: Adam Smith berpendapat bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa, dan bahwa baik alam maupun tanah tidak memiliki arti kecuali sumber daya manusia (SDM) dapat mengolahnya dengan cara yang bermanfaat bagi kehidupan. Selain itu, Adam Smith menyatakan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan langkah pertama menuju pertumbuhan ekonomi dan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat, atau kondisi yang diperlukan, untuk pertumbuhan ekonomi.
2. Menurut teori Malthus, pertumbuhan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia jauh lebih cepat daripada pertumbuhan populasi manusia. Menurut teorinya, hanya deret ukur (1,2,4,8,16,32, dst.) digunakan untuk mengukur pertumbuhan populasi manusia, sedangkan deret hitung hanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan produksi makanan (1,3, 4, 6, 8, 10, dst.). Karena pertumbuhan produksi makanan lebih lambat daripada perkembangan populasi manusia, malapetaka pasti akan terjadi.

Dalam IPM, pembangunan manusia berbeda dengan pengembangan sumber daya manusia. Dalam IPM, manusia disebut sebagai tenaga kerja yang memerlukan peningkatan produktivitas sebagai bagian dari produksi. Dalam hal ini, manusia hanyalah alat (input) untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan output barang dan jasa. Di sisi lain, manusia dalam IPM dipandang sebagai tujuan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

2.1.3 Tujuan Pembangunan Manusia

Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia, empat hal utama harus diperhatikan: produksi, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Berikut adalah garis besarnya:

1. **Produktivitas:** Kemampuan sebuah masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi secara penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dapat dimasukkan ke dalam kategori pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.
2. **Pemerataan:** Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ke semua sumber daya ekonomi dan sosial, dan kegiatan yang dapat mengurangi kesempatan orang lain untuk mendapatkan akses ke semua sumber daya tersebut.
3. **Generasi sekarang dan generasi berikutnya** harus memiliki akses ke sumber daya sosial dan ekonomi.
4. **Penduduk** harus berpartisipasi dan berpartisipasi secara penuh dalam proses dan keputusan yang akan menentukan kehidupan mereka. Memanfaatkan proses pembangunan penduduk juga harus dilakukan. Sebenarnya, model pembangunan manusia tidak terbatas pada keempat hal tersebut. Ini mencakup beberapa alternatif tambahan yang diperlukan masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan sosial, serta kesempatan untuk menjadi inovatif dan produktif serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan hak-hak azasi manusia.

Pudjianto dan Syawie (2016) menyatakan dalam jurnal *Kemiskinan Dan Pembangunan Manusia (Poverty And Human Development)* bahwa pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari pembangunan ekonomi dan metode terbaik untuk mendorong pembangunan. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjalani hidup yang penuh, produktif, dan menyenangkan

adalah tujuan pembangunan manusia. Misalnya, umur panjang, kesehatan yang baik, terdidik, memiliki pendapatan yang cukup untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal, dan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 Manfaat Indeks Penguasaan Manusia

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai alat untuk mengukur keberhasilan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat digunakan sebagai data strategis untuk Indonesia.

2.1.5 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Menurut United Nations Development Program (Undp, 1990) di Indonesia, UNDP meluncurkan Human Development Index (HDI) pada tahun 1990. Ini adalah indeks yang mengukur kualitas derajat manusia berdasarkan hasil pembangunan ekonomi dan menggunakan indikator sosi-ekonomi yang lebih rinci daripada GNI (Produk Nasional Bruto). Selain itu, indeks pembangunan manusia memungkinkan perbandingan negara dalam berbagai cara. Tidak ada komposisi indikator dimensi yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia negara. IPM dapat dihitung dengan menggunakan metode berikut:

1. Dimensi Umur Harapan Hidup (UHH)-*Life Expectancy (Le)*

Dimensi Umur Harapan Hidup (UHH)-*Life Expectancy (Le)* adalah perkiraan rata-rata tambahan umur yang diharapkan untuk hidup seseorang. UHH juga dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani seseorang setelah ulang tahunnya yang kesekian. Orang paling sering menggunakan umur harapan hidup saat lahir, yang menunjukkan kondisi kesehatan saat itu. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan "UHH", yang dimaksudkan adalah jumlah tahun rata-rata yang akan dijalani seseorang sejak lahir.

Umur harapan hidup dihitung dengan menggunakan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate, atau ASDR), yang datanya diperoleh dari catatan kematian selama bertahun-tahun. Untuk menghitung Umur Harapan Hidup, metode tidak langsung dengan program Mortpak Lite digunakan karena sistem registrasi penduduk Indonesia gagal. Metode ini membutuhkan data tentang jumlah bayi rata-rata yang dilahirkan dan yang masih hidup. Metode Trussel saat ini dianggap cukup moderat untuk mengukur harapan hidup penduduk.

Umur harapan hidup adalah alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan derajat kesehatan secara khusus. Program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan pemberantasan kemiskinan, harus dimulai setelah umur harapan hidup turun di suatu wilayah.

2. Dimensi Harapan Lama Sekolah (HLS)-*Expected Years of Schooling (EYS)*

Dimensi Harapan Lama Sekolah (HLS)-*Expected Years of Schooling (EYS)* adalah jumlah tahun pendidikan yang diharapkan anak-anak pada usia tertentu akan habiskan di masa depan. HLS dihitung mulai dari usia 7 tahun ke atas karena merupakan program pendidikan wajib pemerintah dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dikoreksi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang tidak tercakup dalam Susenas ketika siswa bersekolah di pesantren. Data untuk pesantren diberikan oleh Direktorat Pendidikan Islam.

3. Dimensi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) *Mean Years of Schooling (MYS)*

Dimensi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) *Mean Years of Schooling (MYS)* adalah jumlah tahun yang dihabiskan seseorang untuk mengikuti pendidikan formal. Penduduk yang

dihitung RLS adalah mereka yang berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa mereka telah menyelesaikan pendidikan pada usia 25 tahun. Penghitungan RLS dilakukan sesuai dengan standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

4. Dimensi Pengeluaran PerKapita Disesuaikan **Purchasing Power Parity (PPP)**

Dimensi Pengeluaran PerKapita Disesuaikan Purchasing Power Parity (PPP) merupakan pengeluaran perkapita yang digunakan untuk menentukan standar hidup manusia. Indikator ini dipengaruhi oleh pengetahuan saat ini dan peluang untuk menggunakan pengetahuan ini dalam berbagai penelitian yang menghasilkan produk dan jasa sebagai pendapatan. Pendapatan juga menentukan konsumsi dan pengeluaran. Pengeluaran perkapita adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menilai status pembangunan manusia di suatu wilayah dan menunjukkan tingkat daya beli masyarakat PPP (Purchasing Power Parity). SUSENAS menghitung pengeluaran rata-rata per kapita tahunan untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Penghitungan ini dilakukan secara konstan atau riil berdasarkan tahun dasar 2012=100.

Untuk menghitung paritas daya beli, metode baru menggunakan 96 komoditas, 66 di antaranya adalah komoditas makanan, dan sisanya adalah komoditas non-makanan. Metode Rao digunakan untuk menghitungnya.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.1 Definisi Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sugirno (2016), PDRB adalah nilai tambah bruto total yang dihasilkan dari semua sektor ekonomi di wilayah atau provinsi. Nilai tambah bruto dapat didefinisikan sebagai jumlah produksi tambahan dikurangi dengan biaya antara. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibuat dengan menghitung nilai tambah bruto untuk setiap sektor dan kemudian menjumlahkannya. Ini disebabkan oleh komponen pendapatan seperti penyusutan, pajak tidak langsung neto, bunga, keuntungan sewa tanah, dan upah dan gaji.

2.2.2 Teori PDRB

Teori PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terdiri dari:

1. Teori Neoklasik yang dikemukakan oleh Solow-Swan mengatakan bahwa kemajuan teknologi, tenaga kerja, akumulasi modal, dan penduduk adalah semua faktor produksi yang tersedia. Berdasarkan penelitian yang dia lakukan, Solow menyatakan bahwa kemajuan teknologi sangat penting untuk pertemuan ekonomi. Menurut teori ekonomi neoklasik, negara-negara berkembang terbelakang karena alokasi sumber daya yang tidak adil. Kebijakan penetapan harga yang tidak memadai dan intervensi pemerintah yang berlebihan adalah dasar alokasi sumber daya sebelumnya.
- 2). Menurut Simon Kuznett, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Penyesuaian institusional, perspektif, dan ideologi, serta kemajuan konsisten dalam produksi nasional dan teknologi, mendorong peningkatan kapasitas ini.
- 3). Konsep laju pertumbuhan alamiah adalah inti dari teori Harrod-Domar dan mencakup peningkatan jumlah tenaga kerja faktor produksi serta peningkatan efisiensi pendidikan dan pelatihan. Model ini memiliki kemampuan untuk menentukan jumlah investasi atau tabungan yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi alami. Hasilnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan rasio modal terhadap produksi. Harrod-Domar berpendapat bahwa permintaan total harus meningkat setiap tahun sebanding dengan peningkatan kapasitas barang modal yang dihasilkan dari investasi sehingga setiap barang modal yang tersedia dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
4. Menurut teori Schumpeter, wirausahawan adalah kelompok orang yang secara konsisten mempengaruhi atau menciptakan inovasi dalam kegiatan ekonomi dan memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter, semakin maju kemajuan ekonomi,

semakin sedikit peluang untuk inovasi, dan sebagai akibatnya, berbagai inovasi membutuhkan investasi baru, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Pendekatan PDRB

Pendapatan regional adalah indikator ekonomi yang menunjukkan seberapa baik kinerja ekonomi suatu wilayah. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menghitung pendapatan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dibuat oleh seluruh unit bisnis, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dibuat oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, PDB dapat mencakup jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, diekspor, atau disimpan dalam inventori untuk dijual selama periode mendatan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk menghitung Produk Domestik Regional (PDRB) secara konseptual:

1. Pendekatan Pendapatan PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang berpartisipasi dalam proses produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, ditambah pajak atas produk neto (pajak kurang subsidi atas produk).
2. Pendekatan Produksi PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit produksi suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.
3. Pendekatan Pengeluaran PDRB mencakup semua komponen permintaan akhir, yaitu: (1) Pengeluaran Rumah Tangga; (2) Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT); (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto; (5) Perubahan Inventori; dan (6) Ekspor Neto, yang berarti bahwa impor lebih rendah

daripada ekspor. Metode, ruang lingkup, dan sumber data yang digunakan berbeda dalam perhitungan PDRB. Perbedaan ini dibuat untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi dalam membuat estimasi, mengontrol kelayakan estimasi, dan memungkinkan analisis PDRB yang lebih baik.

2.3 Persentase Penduduk Miskin

2.3.1 Definisi Kemiskinan

Sebagian besar orang menganggap kemiskinan sebagai masalah ekonomi, tetapi kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya masyarakat. Kemiskinan, yang merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti papan, pakaian, dan makanan, adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Fenomena seperti ini biasanya disebabkan oleh sumber daya manusia yang buruk dan penghasilan masyarakat yang rendah. Hal ini terjadi di negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi, yang menyebabkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Untuk mengukur kemiskinan, Pusat Statistik (2022) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka, seperti kebutuhan makanan dan non-makanan.

Garis kemiskinan (GK) adalah standar yang digunakan oleh Organisasi Pusat Statistik (2022) untuk menentukan tingkat kemiskinan. Ada dua garis kemiskinan: garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). GKM adalah suatu pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar 2.100 kg makanan, sedangkan GKNM adalah suatu pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa

kemiskinan adalah ketika jumlah orang yang dianggap miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan.

Rumus Perhitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Keterangan :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

2.3.2 Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan terbagi menjadi dua kategori: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kategori lain terdiri dari kemiskinan berdasarkan penyebabnya, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Dalam pembicaraan tentang kemiskinan, hal-hal seperti klasifikasi kemiskinan, cara mengukur tingkat kemiskinan dengan indeks kemiskinan air, dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dibahas. Penjelasan tentang kemiskinan absolut dan relatif dapat ditemukan di bawah ini:

1. Kemiskinan absolut diukur melalui tingkat pendapatan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokok, dengan orang dengan pendapatan lebih rendah dianggap miskin.
2. Ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan menyebabkan kemiskinan relatif. Salah satu cara untuk menentukan tingkat kemiskinan adalah dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Jika pendapatan seseorang lebih rendah daripada pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut dinyatakan miskin. Kemiskinan

dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan penyebabnya: kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (Susilowati, 2013).

Kemiskinan struktural dan kultural adalah dua kategori yang berbeda.

Ini adalah penjelasan tentang kemiskinan kultural dan struktural:

1. Kemiskinan budaya adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal, seperti keadaan internal seseorang, adat istiadat, atau budaya, sehingga sebagian besar masyarakat miskin budaya menganggap kemiskinan sebagai takdir.
2. Kemiskinan struktural didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti struktur atau tatanan kehidupan yang tidak adil di suatu wilayah yang menghalangi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Untuk mengatasi kemiskinan budaya ini, masyarakat harus mengabaikan budaya yang relevan. Budaya-budaya ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pemberdayaan masyarakat, akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan sebagainya.

2.3.3 Teori Kemiskinan

"Penduduk miskin biasanya tinggal di daerah pedesaan dengan mencari uang melalui pertanian dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan sektor ekonomi konvensional yang biasanya dilakukan secara bersama-sama", kata Todaro dan Smith (2003:269). Mayoritas dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan mereka terdiri dari penduduk pribumi dan kelompok etnis minoritas.

Kuncoro mengatakan bahwa "Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya manusia (SDM) yang menimbulkan distribusi pendapatan yang sangat timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah terbatas dengan kualitas sangat rendah. Kemiskinan juga muncul karena

perbedaan sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang rendah berdampak pada produktivitas rendah, sehingga menghasilkan upah yang lebih rendah."

Teori tentang kemiskinan yang dikenal sebagai "lingkaran setan" diciptakan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan tidak memiliki dasar atau akhir karena semua faktor yang menyebabkannya berhubungan satu sama lain. Penurunan pendapatan masyarakat disebabkan oleh produksi yang rendah di wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tidak berjalan dengan baik.



Sumber : Nurske (1953) dalam Kuncoro, 2000

Gambar 2.1 Ilustrasi Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse

Dalam teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, dokter mengatakan bahwa dua hal menyebabkan kemiskinan: hambatan untuk maju di masa depan dan ketiadaan kesempatan untuk maju di masa lalu. Karena itu, Nurkse mengatakan, "Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin." Dia berpendapat bahwa kondisi yang menghalangi pembentukan

modal adalah bagian dari lingkaran setan kemiskinan. Tingkat tabungan tidak mempengaruhi pembentukan modal, tetapi perangsang untuk menanam modal.

Kedua hal tersebut menghambat negara berkembang untuk mencapai tingkat pembentukan modal yang tinggi. Akibatnya, Nurkse berpendapat bahwa terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan, yang terdiri dari permintaan modal dan penawaran modal. Komponen permintaan modal lingkaran setan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Corak lingkaran kemiskinan berbeda-beda tergantung pada jumlah modal yang diperlukan. Yang telah disebutkan sebelumnya, ketersediaan pasar yang terbatas menyebabkan penanaman modal yang rendah di negara-negara miskin. Namun, pembentukan modal yang terbatas sebelumnya menyebabkan produktivitas yang rendah. Ketiadaan stimulus untuk menanam modal menyebabkan pembentukan modal yang rendah. Sebaliknya, Nurkse mengatakan bahwa selain lingkaran perangkap kemiskinan yang disebutkan di atas, ada banyak hambatan lain yang menghalangi pertumbuhan pembentukan modal. Ketika contoh atau tindakan suatu negara dipengaruhi oleh contoh atau tindakan negara lain, terutama negara maju atau berkembang yang sangat maju, hal itu disebut demonstrasi internasional. Efek demonstrasi internasional adalah namanya.

Shanon et al. (199: 72) menggambarkan kemiskinan sebagai masalah yang muncul pada seseorang yang disebabkan oleh pilihan dan kesalahan mereka sendiri. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya saat kekuatan pasar meningkat dan pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya. Menurut teori ini, penanggulangan kemiskinan bersifat residual dan mencakup keluarga, kelompok swadaya, dan lembaga keagamaan. Setelah lembaga-lembaga ini gagal

mengatasi kemiskinan, negara akan mengambil tindakan. Menurut Lumantari (2019), salah satu contoh teori ini adalah Program Jaminan Pengaman Sosial (JPS).

Selain itu, teori sosial demokrat berpendapat bahwa kemiskinan lebih merupakan masalah struktural daripada masalah individu. Kemiskinan menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan yang disebabkan oleh keterbatasan masyarakat terhadap sumber-sumber modal. Manajemen negara dan pendanaan sangat penting untuk menyediakan layanan sosial dasar bagi seluruh masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa program jaminan sosial dan bantuan sosial harus digunakan untuk menangkal kemiskinan (Lumantari, 2019).

Menurut teori pembangunan, masalah ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan adalah penyebab utama kemiskinan. "Negara menjadi miskin karena tidak memiliki atribut industrialisasi, modal, kemampuan manajemen, dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi," menurut teori yang disebutkan di atas. Pertumbuhan ekonomi, yang dianggap dapat mengatasi ketimpangan, merupakan standar utama pembangunan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi didorong setinggi mungkin. Dengan asumsi ini, kemiskinan bukan hanya masalah budaya; itu adalah masalah ekonomi dan pembangunan (Lumantari, 2019).

2.3.4 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan, menurut Bank Dunia, terdiri dari: kepemilikan tanah dan modal yang terbatas; pembangunan kota yang tidak adil; ketidaksamaan kesempatan di antara anggota masyarakat; perbedaan dalam sektor ekonomi dan sumber daya manusia; produktivitas yang rendah; budaya hidup yang buruk; tata pemerintahan yang buruk; pengelolaan sumber daya alam yang buruk; dan beberapa lainnya.

BPS (2023) menyatakan bahwa pendekatan kebutuhan dasar adalah dasar dari penggunaan tiga indikator kemiskinan. Pertama, Indeks Angka Jumlah (HCI-P0) menunjukkan persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Yang kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antara setiap orang miskin dan garis kemiskinan. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Indikator garis kemiskinan pada dasarnya mengukur kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak orang yang termasuk dalam kategori miskin:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \frac{[z-y_i]_0}{z}$$

Keterangan :

P_0 = Persentase penduduk yang miskin

Z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah Penduduk

2.3.5 Penyebab Kemiskinan

Menurut Spicker (dalam Agustina, Syechalad, dan Hamzah, 2018), empat mazhab (aliran) berbeda dapat membagi penyebab kemiskinan menjadi empat kategori. Yang pertama adalah penjelasan individu, yang mengacu pada kemiskinan sebagai akibat oleh kemalasan dan berbagai jenis kecacatan, seperti membuat keputusan yang salah, memiliki anak pada waktu yang salah, gagal bekerja, dll. Dalam penjelasan keluarga, kemiskinan dapat disebabkan oleh warisan pendidikan dan perawatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketiga, alasan subkultural

mengatakan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh situasi yang mempengaruhi keputusan individu daripada pola perilaku. Keempat, penjelasan struktural mengidentifikasi kemiskinan sebagai akibat dari masyarakat lokal. Kemiskinan menimbulkan perbedaan sosial yang disebabkan oleh kelas, status, kekuatan, atau kelas sosial.

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, adalah penyebab utama kemiskinan, terutama di daerah pedesaan (dalam Deny Tisna, 2008). Pada tahun 2006, lebih banyak orang miskin tinggal di daerah pedesaan daripada di perkotaan. Kesempatan berusaha belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di kedua kota dan pedesaan, terutama bagi rumah tangga miskin. Selain itu, mereka yang miskin tidak memiliki akses ke pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air minum dan sanitasi, dan sarana transportasi. Masyarakat miskin masih menggunakan makanan buruk. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Tidak ada bantuan sosial untuk rumah tangga miskin dan jaminan sosial untuk orang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu.

Beberapa penyebab kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua kategori: 1) Faktor kondisi alam dan lingkungan: faktor ini termasuk bencana alam yang sering terjadi, kerusakan lingkungan yang meningkat, dan distribusi sumber daya yang tidak merata; 2) Faktor penduduk: faktor ini termasuk pertumbuhan penduduk, yang menekan sumber daya alam, dan migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan; 3). Faktor eksploitasi: Eksploitasi terjadi antara kelas, kelompok, wilayah, dan negara, termasuk ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi internasional antara negara maju dan negara berkembang. Faktor kelembagaan dan struktural termasuk kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan sering mengabaikan daerah pedesaan.

Faktor teknologi juga sangat penting untuk meningkatkan dan mendorong ekonomi internasional.

2.4 Jumlah Penduduk

2.4.1 Definisi Jumlah Penduduk

Karena mereka menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, dan usahawan, penduduk memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian karena mereka adalah tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, dan usahawan.

Sebagai subjek ekonomi, penduduk memiliki kemampuan untuk menentukan apakah perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dengan cara yang lebih baik atau lebih buruk. Jumlah dan kualitas populasi suatu negara atau daerah sangat memengaruhi kemampuan produksi dan standar hidupnya. Namun, masalah penduduk menarik perhatian para pakar ekonomi karena penduduk adalah sumber sumber daya manusia dan tenaga kerja (Rosyidi, 2002:87).

Karena penduduk tinggal di sana sebagai tenaga kerja dan sumber keterampilan, banyak orang berkualitas tinggi. Menurut RIJM tahun 1993, hal ini disebabkan oleh populasi yang besar, yang menunjukkan bahwa populasi yang besar adalah sumber daya manusia yang potensial untuk kemajuan.

2.4.2 Jenis Sensus Penduduk

Menurut Latumaerissa, Julius R. (2015), suatu negara dapat menggunakan sensus atau cacah jiwa untuk mengetahui jumlah penduduknya. Selain itu, sensus dapat digunakan oleh suatu

negara untuk mengetahui apakah ia masuk dalam kategori negara yang padat atau jarang. Dua jenis sensus yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah:

a. Sensus de facto: Negara-negara di Eropa sering menggunakan sensus de facto untuk mengetahui berapa banyak orang yang tinggal di sana. Menurut sensus ini, penduduk adalah setiap orang yang terdaftar dalam daftar sensus dan dianggap sebagai penduduk saat sensus dilakukan (warga negara-WNA-turis). Oleh karena itu, setiap orang yang berada di negara saat sensus dilakukan disebut atau dianggap sebagai penduduk negara tersebut.

b. Sensus de jure: Sensus ini mendefinisikan penduduk sebagai warga negara atau warga negara asing (WNA) yang tinggal di negara yang bersangkutan. Orang-orang yang tinggal di negara saat sensus dilakukan tidak dianggap sebagai penduduk dalam sensus tersebut. Misalnya, turis dan individu dengan KTP Pandeglang tidak akan dianggap sebagai penduduk Kota Serang. Negara-negara Asia seperti Indonesia, Afrika, dan Amerika Utara biasanya menggunakan sensus ini. Untuk perencanaan ekonomi, data sensus de jure dapat digunakan karena lebih menunjukkan jumlah penduduk yang sebenarnya.

2.4.3 Teori Jumlah Penduduk

Berikut ini merupakan teori jumlah penduduk yaitu:

1) Teori menurut Adam Smith menyatakan bahwa jumlah penduduk adalah komponen penting dari produksi, dan dapat digunakan untuk meningkatkan produksi rumah tangga perusahaan. Semakin banyak orang berarti lebih banyak tenaga kerja. Teori nilai tenaga kerja menjelaskan nilai semua barang, termasuk barang yang pekerja jual ke kapitalis untuk uang dan barang "Tenaga Kerja", yaitu kemampuan pekerja untuk membuat barang dan jasa. Marx juga menggunakan prinsip ekonomi klasik, yang menyatakan bahwa nilai tenaga kerja harus bergantung pada jumlah jam kerja yang dibutuhkan masyarakat rata-rata untuk memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal agar mereka dapat bekerja. Dengan kata lain, upah yang diterima

pekerja dalam jangka panjang akan bergantung pada jumlah jam kerja yang dibutuhkan masyarakat rata-rata untuk menghasilkan individu yang layak bekerja.

2). Dalam teorinya, Robert Malthus berpendapat bahwa meskipun peningkatan populasi pada awalnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan populasi dapat menyebabkan "Keadaan Stasioner", yang pada gilirannya dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Thomas Malthus dan ekonom klasik lainnya berpendapat bahwa peningkatan populasi akan menyebabkan "Keadaan Stasioner", yang pada gilirannya akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran tentang ekonomi populasi muncul kembali pada tahun 1940 dan 1950-an. Mereka berpendapat bahwa sebagian besar arus keluaran harus digunakan untuk membangun modal perumahan, peralatan, dan mesin untuk masyarakat yang sedang berkembang. Dua ekonom yang mendukung teori Malthus, Ester Boserup dan Alm. Julian Siman, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki efek ekonomi yang menguntungkan.

3). Menurut teori David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang berlebihan dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja hingga dua kali lipat. Karena kurangnya tenaga kerja, upah yang diterima menurun, sehingga hanya dapat membayar tingkat hidup minimum. Perekonomian saat ini berada dalam "Stasioner State", kata yang berarti stagnasi atau kemandekan.

4). Menurut teori fisiologis Michael T. Sadler dan Doubleday, daya reproduksi manusia dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu negara atau wilayah. Daya reproduksi meningkat dengan kepadatan penduduk yang rendah, sedangkan kepadatan penduduk yang rendah menghasilkan daya reproduksi yang rendah.

5). Teori Penduduk Optimum menjelaskan hubungan antara pendapatan PerKapita dan jumlah penduduk. Teori ini berpendapat bahwa pendapatan penduduk akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

2.5 Hubungan Teoritis Antar Variabel Penelitian

2.5.1 Pengaruh PDRB Terhadap IPM

Menurut Muliza dkk. (2017), salah satu komponen yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah Produk Domestik Regional Bruto. Komponen ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah. Pembangunan manusia juga dapat dimanfaatkan dari pendapatan. Masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik berkat investasi ini. Ini akan memungkinkan karyawan menjadi lebih produktif dan memperoleh keterampilan baru serta kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan komponen utama dalam pembangunan suatu negara, tetapi keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh komponen lain. Selanjutnya, penelitian Pratowo (2016) menggunakan variabel dependen IPM dan variabel independen APBD, gini rasio, proporsi pengeluaran non-makanan, dan rasio ketergantungan untuk menyelidiki elemen yang memengaruhi IPM. Penelitian ini menemukan bahwa APBD dan proporsi pengeluaran non-makanan berdampak pada IPM, dengan menggunakan alat analisis data panel. Sebaliknya, rasio Gini dan ketergantungan berdampak negatif pada IPM.

2.5.2 Pengaruh Kemiskinan Terhadap IPM

Menurut Ramadona et al. (2016), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, atau dengan kata lain, hilangnya kesejahteraan. Namun, saat ini semua orang membutuhkan pendidikan dan perawatan kesehatan. Tiga penyebab utama miskin termasuk

dalam lingkaran setan kemiskinan: (1) rendahnya tingkat kesehatan, (2) rendahnya pendapatan, dan (3) rendahnya tingkat pendidikan, menurut Winarti (2014).

2.5.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap IPM

Pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk adalah dua komponen utama proses pembangunan, menurut Adam Smith (Jasasila, 2020). Adanya spealisasi ekonomi akan disebabkan oleh peningkatan populasi, yang berdampak pada pasar yang semakin luas. Pembagian kerja dan spesialisasi akan mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Studi yang dilakukan oleh Khadijah et al., (2022) menemukan bahwa angka pengangguran akan meningkat jika jumlah penduduk yang besar tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Hasan, Nurhikmah Malia (2016)	Pengaruh Produk Domenstik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Daerah Istimewa	Dalam penelitian ini, data panel digunakan untuk menganalisis.	Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara positif dan signifikan, kemiskinan secara negatif dan signifikan, dan belanja modal secara positif dan signifikan.

		Yogyakarta Periode 2008- 2014		
2.	Rinawati, Yuni (2022)	Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2021	Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan data panel regresi data panel. Program Eviews 10 digunakan untuk melakukan ini.	Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh PDRB, kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap IPM di Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2021 secara parsial dan simultan. Dalam interpretasi data menggunakan Model Efek Tetap (FEM), hasil uji F menunjukkan bahwa PDRB, kemiskinan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, hasil uji t menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
3.	AlFurqan, Muhammad Naufal (2022)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh	Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto dan dana desa. Penelitian ini menggunakan data panel dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun

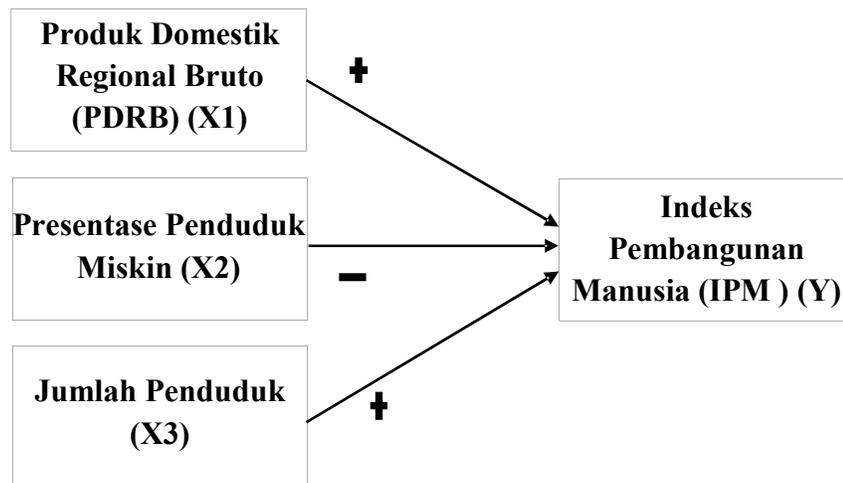
				2015 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan pembangunan manusia, yang diperoleh dari BPS Aceh Aceh dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dipengaruhi secara signifikan oleh produk domestik regional bruto dan dana desa, masing-masing sebagai variabel independen
4.	Amelinda, Diella Vania (2022)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM Kabupaten Tulungagung	Dalam diskusi ini, metode kuantitatif digunakan, khususnya pendekatan eksplanatori. Metode ini memungkinkan saya untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel yang mempengaruhi hipotesis penelitian ini.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tulungagung. Data sekunder yang digunakan berasal dari BPS Kabupaten Tulungagung selama sepuluh tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga 2020. Hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi secara parsial mempengaruhi IPM secara negatif dan signifikan. Selain itu, tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi

				secara bersamaan mempengaruhi IPM, dengan koefisien determinasi penelitian ini adalah 98,5%.
5.	Bahriyah, Munifatul (2022)	Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM Di Kabupaten Gresik	Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Ordinary Least Square (OLS).	Menurut data sekunder yang dikumpulkan dari situs web BPS Kabupaten Gresik dan BPS Jawa Timur, peningkatan IPM di Kabupaten Gresik dari tahun 2011 hingga 2020 dapat dikaitkan dengan pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran (X1) tidak berdampak signifikan terhadap IPM (Y), tetapi variabel kemiskinan (X2) dan pertumbuhan ekonomi (X3) berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM (Y). Sementara itu, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM (Y) di Kabupaten Gresik dari tahun 2011 hingga 2020

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)

2.7 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah skema kerangka pemikiran teoritis, yang berasal dari teori yang dibahas dan dihubungkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Skema kerangka pemikiran ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Seperti yang dijelaskan oleh J. Supranto (1997), hipotesis adalah pendapat sementara yang memberikan garis besar dan arah untuk penelitian yang didasarkan pada teori yang relevan. Setiap hipotesis ditulis dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Setiap hipotesis selalu ditulis dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo; 2. Presentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Karo; dan 3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dimuat dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo dan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Karo. Penulis tidak menggunakan populasi atau sampel dalam penelitian ini karena mereka ingin mengetahui bagaimana kondisi Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo.

3.2 Model Analisis Data

Dalam analisis struktural, model regresi linier berganda digunakan sebagai model ekonometrik untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

3.2.1 Pendugaan Model Ekonometrik

Hubungan fungsional berikut dapat diuraikan dari diskusi dan masalah faktor-faktor

yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karo:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Persamaan berikut dibuat berdasarkan hubungan fungsional tersebut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \varepsilon_i : i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Namun, model persamaan regresi linier berganda diubah menjadi dua log karena satuan data (variabel bebas dan variabel tak bebas) berbeda dan nilai tidak berdistribusi normal.

$$\text{Ln}\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \text{Ln}X_{1i} + \hat{\beta}_2 \text{Ln}X_{2i} + \hat{\beta}_3 \text{Ln}X_{3i} + \varepsilon_i : i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Dimana:

Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$\hat{\beta}_0$: Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi (Statistik)

X_{1i} : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ribu Rupiah)

X_{2i} : Persentase Penduduk Miskin (Jiwa)

X_{3i} : Jumlah Penduduk (Orang)

ε : Galat (*error term*)

3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Dengan menggunakan parameter populasi, pengujian hipotesis yang digunakan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

terhadap kemiskinan, jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai signifikan 0,05, atau $\alpha = 5\%$, digunakan untuk menguji.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab. Karo 2011-2022

$H_1 : \beta_1 > 0$ artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab. Karo 2011-2022

2. Presentase Jumlah Penduduk Miskin (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$ artinya Presentase Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab. Karo 2011-2022

$H_1 : \beta_2 < 0$ Presentase Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab. Karo 2011-2022

3. Jumlah Penduduk (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$ artinya Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab. Karo 2011-2022

$H_1 : \beta_3 > 0$ artinya Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab. Karo 2011-2022

Pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen dipastikan dengan menggunakan koefisien regresi. Salah satu cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan tingkat signifikansi dan nilai probabilitas. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika nilai probability t-statistik $< 0,05\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

b. Jika nilai probability t-statistik > 0,05% maka H0 diterima dan H0 ditolak

3.3.2 Uji Secara Simultan (Uji-F)

Dalam mengetahui apakah seluruh faktor independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen digunakan uji simultan (Uji-F). Prosedur pengujian F-test adalah sebagai berikut:

a. Menurut hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1)

Membuat hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) sebagai berikut :

1. H0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. H1 : β_1 tidak semua nol, $i = 1, 2, 3$ berarti variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Mencari nilai Fhitung ada nilai kritis F statistik dari Tabel F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k). Rumus untuk mencari Fhitung adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR (k - 1)}{JKG (n - k)}$$

Dimana:

JKR= Jumlah Kuadrat Regresi

JKG = Jumlah Kuadrat Galat

K = Banyak koefisien regresi

n = Banyak sampel

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen digunakan uji simultan (uji-F). Estimasi kelayakan suatu model

regresi ditentukan dengan menggunakan uji-F yang sering disebut dengan uji kelayakan model. Ada tingkat kepercayaan 5% yang digunakan. Landasan dalam memutuskan yaitu:

1. Jika probabilitas (signifikan) $> 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.4 Uji Keباikan Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya varians variabel terikat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing variabel bebas diukur dengan koefisien determinasi. Berikut kriteria pengujiannya:

- a. Apabila nilai R^2 mendekati satu maka kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi variabel terikat adalah besar.
- b. Apabila nilai R^2 mendekati nol maka kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi variabel terikat adalah kecil. Rumusnya:

$$R^2 = \frac{JKR}{JKG} = 100\%$$

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi

JKG = Jumlah Kuadrat Gala

3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linier antar variabel independen dalam regresi, menurut Widarjono (2013: 104). Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel independen. Multikolinearitas antar variabel independen tidak boleh terjadi dalam model regresi yang layak.

Faktor Inflasi Variasi, juga dikenal sebagai VIF, dapat digunakan untuk menentukan gejala multikolinearitas. Jika nilai VIF lebih dari 10, ada masalah multikolinearitas antar variabel independen. Dengan kata lain, lebih tinggi nilai VIF, keadaan dianggap lebih buruk. Untuk

mengatasi multikolinearitas, dua pendekatan dapat digunakan: mencari variabel independen tambahan untuk mendukung prediksi; atau, menghilangkan satu atau lebih variabel independen yang memiliki korelasi tinggi dari model regresi.

Uji autokorelasi adalah studi statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara sejumlah observasi yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai sampel sangat dipengaruhi oleh nilai sampel sebelumnya. Oleh karena itu, jika datanya adalah data runtun waktu, uji autokorelasi harus dilakukan dengan menggunakan model regresi linier. Metode Durbin-Watson dan Run Test digunakan untuk menemukan masalah asumsi autokorelasi.

3.5.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah studi statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara sejumlah observasi yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Nilai sampel sebelumnya sangat memengaruhi nilai sampel baru, menurut autokorelasi. Oleh karena itu, jika datanya adalah runtun waktu, uji autokorelasi harus dilakukan dengan menggunakan model regresi linier. Masalah asumsi autokorelasi ditangani dengan uji run dan metode Durbin-Watson.

1. Uji Durbin-Watson (Uji DW)

“Untuk autokorelasi derajat (orde) satu, uji DW membutuhkan adanya intersep, atau konstanta, dalam model regresi dan tidak ada variabel lag atau kelambanan di antara peubah bebas. Menurut Ghozali (2018:111), dengan jumlah sampel dan jumlah variabel bebas tertentu, nilai kritis dL dan dU dalam Gambar DW untuk berbagai nilai α . Dalam kebanyakan kasus, angka D-W di bawah -2 menunjukkan autokorelasi positif; angka D-W di atas +2 menunjukkan autokorelasi negatif; dan angka D-W di antara -2 dan +2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Jika uji D-W menunjukkan tidak ada korelasi, uji run dilakukan.

2. Uji Run

Uji run akan digunakan oleh Durbin Watson untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi pada model jika hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada keputusan. Bagian dari statistika nonparametrik adalah uji run, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah terdapat korelasi yang tinggi antara galat. "Percobaan Latihan" digunakan untuk menentukan apakah dana residual terjadi secara acak atau tidak sistematis. Hal ini terjadi jika tidak ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau galat residu. Galat (res_1) digunakan secara acak dalam H_0 dan Galat (res_1) tidak acak dalam H_1 .

1.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah asumsi yang banyak digunakan dalam estimasi dengan estimator OLS. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel residual atau error pada model regresi berdistribusi normal. Dengan menggunakan uji t dan uji F, diasumsikan bahwa nilai error terdistribusi secara teratur. Jika asumsi ini tidak dipenuhi atau dilanggar dalam sampel yang kecil, uji statistik akan dianggap tidak valid. Digunakan grafik dan uji statistik untuk mengetahui apakah galat menyebar secara umum atau tidak, yaitu:

a. Analisis Grafik

Untuk menguji grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, seseorang menggunakan sebaran peluang normal untuk membandingkan distribusi kumulatif dari sebaran normal. Garis yang menggambarkan data sebenarnya akan mengikuti garis diagonal, sedangkan sebaran normal membentuk satu garis lurus diagonal.

b. Analisis Statistik

Nilai kemencengan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari sebaran galat dapat diamati untuk membuat kesimpulan yang lebih tepat tentang apakah residu menyebar normal atau galat..

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, definisi operasional dari variabel-variabel berikut digunakan:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh Kabupaten Karo dari tahun 2003 hingga 2022, dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dalam satuan milyar rupiah per tahun.

b. Presentase Penduduk Miskin (X2)

Presentase Penduduk Miskin adalah jumlah penduduk di Kabupaten Karo yang memiliki rata-rata pengeluaran PerKapita perbulan dibawah garis kemiskinan dengan perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Karo seluruhnya pada periode yang sama dalam satuan persen/tahun.

c. Jumlah Penduduk (X3)

Jumlah penduduk adalah jumlah dengan keseluruhan orang yang bedomisili di wilayah Kabupaten Karoo selama enam bulan atau lebih dari enam bulan dengan memiliki tujuan menetap dalam satuan jiwa/km².

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai capaian pembangunan di Kabupaten Karo yang dihitung dengan menggunakan pengukuran perbandingan empat dimensi dari IPM, yaitu umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah dan standar hidup layak atau tingkat pengeluaran (Ribu/Tahun) di Kabupaten Karo.

